

-----ABSTRAK

Jalin Kesra adalah kebijakan sentralisasi, dimana kebijakan ini berasal dari Gubernur Jawa Timur yaitu Pakde Karwo. Segala prosedur dan mekanisme pelaksanaan dijalankan berdasarkan wewenang dan putusan dari Gubernur melalui Badan Peberdayaan Masyarakat sebagai Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) beserta dengan SKPD Eksekutor. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan kepatuhan aktor pelaksana Jalin Kesra yaitu Gubernur Jawa Timur terhadap RTSM, dimana kepatuhan ini berpengaruh pada kinerja kelembagaan SKPD Eksekutor dalam mengimplementasikan Jalin Kesra.

Dalam implementasi Jalin Kesra, terdapat banyak hal untuk dikaji, mengenai kelembagaan, kepentingan yang terwakili dalam kebijakan serta dampak dari kebijakan Jalin Kesra. Dengan menggunakan teori implementasi Grindle, implementasi dimaknai sebagai upaya dari aktor dalam menjalankan kebijakan sesuai kepentingan yang dimiliki, kepatuhan terhadap lembaga serta perubahan atas dampak kebijakan. Dari penelitian ini, kesimpulan yang didapat yaitu desain kelembagaan dalam mendukung kebijakan ini adalah sentralisasi yang berpusat pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepentingan yang terwakili yaitu terdiri dari kepentingan lembaga, aktor, masyarakat, dan pemerintah setempat. serta dampak kebijakan Jalin Kesra yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta meningkatkan citra Gubernur Jawa Timur di mata masyarakat menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Jalin Kesra, Rumah Tangga Sangat Miskin, Kepentingan.

ABSTRACT

Establish Welfare is centralization policy, where the policy came from the East Java Governor Pakde Karwo. All the procedures and mechanisms of implementation is executed by the authority and decisions of the Board of Governors through Community Empowerment as Administrative Unit (SATMINKAL) along with SKPD's Executor. This policy is run by actors implementing compliance Jalin Welfare ie the Governor of East Java RTSM, where this compliance effect on institutional performance in implementing Jalin SKPD's Executor Welfare.

In the implementation of the Welfare Jalin, there are many things to be studied, the institutional interests are represented in policy as well as the impact of policy Jalin Welfare. By using the theory of implementation Grindle, interpreted as an attempt implementation of actors in a policy in the interest owned, as well as adherence to the institution of the impact of policy changes. From this study, the conclusion is obtained that the institutional design in support of this policy is based on the centralization of East Java Provincial Government. Who represented the interests consist of interests of institutions, actors, communities, and local governments. Establish policies and the impact of the increase kesejahteraan Welfare for the community and improve the image of the Governor of East Java in the public eye for the better.

Keywords: Implementation, Policy, Establish Welfare, Very Poor Households, Interest.